

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian dari pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui besarnya perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. Tingginya tingkat berkembangnya perekonomian yang ditunjukkan oleh hasil PDRB masing-masing wilayah tersebut menghadapi sebuah progres dalam perekonominya. Keberhasilan suatu daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dilihat dari pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Dapat dinyatakan bahwa Produk Domestik Bruto salah satu indikator yang mampu mengukur suatu tingkat kesejahteraan di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.²

PDRB yaitu semua unit baik dari usaha daerah maupun wilayah lainnya, tentu terdapat nilai barang yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi maka akan diperoleh hasil nilai tambah keseluruhannya pada periode tertentu.³ Adapun PDRB adalah keseluruhan barang produk maupun jasa telah diproduksi di suatu wilayah domestik regional, produk

² Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lopian, dan Jakline I Sumual, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Keiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014), *Jurnal Berkala ilmiah Efisiensi*, Vol. 16. No. 03, 2016. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 10.14

³ Badan Statistik, Diakses dari <http://www.bps.go.id>. tanggal 24 Juli 2020. Pukul 13.09

yang dimiliki oleh penduduk domestik bruto tanpa memperdulikan aspek-aspek produksinya. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.⁴ Otonomi daerah memperlakukan Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang perlimbahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka membangun Nasional Negara Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019
(dalam%)

Pertumbuhan PDRB (%)	
Tahun	Jumlah
2012	7,09
2013	6,21
2014	6
2015	5,44
2016	5,55
2017	5,72
2018	5,65
2019	5,15

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur

⁴ Diana Nova Lintong, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat, "Pengaruh Implementasi Simtem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu, *jurnal accountability*. Vol. 06. No. 01, 2017. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 13.30

Menurut tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur dalam bentuk tahunan terdapat perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB di tahun 2012 sebesar 7,09, lalu pada tahun 2013 sebesar 6,21, di tahun 2014 sebesar 6,00, di tahun 2015 sebesar 5,44, dan 2016 sebesar 5,55, pada tahun 2017 sebesar 5,72 dapat dilihat pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,65, tapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar 5,15. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sedangkan ditahun berikutnya tahun 2015-2019 mengalami penurnan yang cukup signifikan.

Terdapat Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kreatifitas dan inovasi untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dan dilaksanakan secara baik dan terarah agar terwujudnya pembangunan disetiap daerah dapat terialisasi dengan benar sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah.⁵ Pada lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) memakai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu, dimana PDRB didefinisikan sebagai tambahan nilai jumlah atas barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu.

⁵ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1983) hal.

Pengelolaan keuangan disuatu daerah tertentu membutuhkan pertimbangan untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan yang telah berjalan selaku efektif dan efisien dengan melakukan sebuah penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut maka kita dapat melihat pengelolaan keuangan di suatu daerah.⁶ Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang diterbitkan melalui perbandingan yang didapat dari APBN yang disalurkan untuk daerah yang mengatur penerapan desentralisasi yang biayanya berdasarkan beban APBD sebagai tugas daerah.⁷

Pendapatan Asli Daerah yaitu modal prioritas yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengatur atau membiayai pemerintahannya. Pendapatan Asli Daerah dibutuhkan untuk memenuhi anggaran belanja daerah dalam proses pengembangan ekonomi, tetapi jika pembangunan ekonomi hanya dibebankan kepada pemerintah saja maka tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Serta Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersaldari sektor retribusi daerah, pajak daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Suatu upaya untuk mendorong Produk Domestik Regional Bruto dalam sebuah kinerja

⁶ Christian D. Sumual, Lintje Kalangi, dan Natalia Y.T Gerungai, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12 No. 2, 2017. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 20.12

⁷ Sugiyanto, "Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia", *jurnal Akuntansi Jember*, Vol. 14 No. 1, 2016. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 20.30

keuangan daerah yang menggunakan rasio efektifitas PAD dan belanja modal maka perlu menjadikannya tingkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan menjadikan sumber pendapatan bagi pemerintah.⁸

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019
(dalam %)

PAD	
Tahun	Jumlah
2012	107,23
2013	115,78
2014	116,89
2015	27,9
2016	28,96
2017	109,51
2018	30,07
2019	61,8

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2019 mengalami flutuasi setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2012 sebesar 107,23 di tahun 2013 sebesar 115,78 di tahun 2014 sebesar 116,89 pada tahun berikutnya mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2015 sebesar 27,9 dan 2016 sebesar 28,96 namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 109,32, ditahun 2018 menurun lagi sebesar 30,07 dan 2019 sebesar 61,8 maka dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

⁸ Wike Nurliza Arpanin dan Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)", *jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, 2020. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 19.44

meningkat lalu ditahun berikutnya menurun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur. Dapat disimpulkan Rasio pendapatan dapat mengalami kenaikan atau penurunan di setiap tahunnya. Kenaikan atau penurunan tersebut salah satu dipengaruhi oleh Belanja Modal untuk itu dapat dilihat belanja modal disetiap presentase setiap tahunnya.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah tersebut, kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah pusat ke daerah serta terakhir dilimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangannya terhadap pemerintah daerah. Belanja modal yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan asset tetap maupun lainnya, dapat bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sesuai penjelasan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah. Untuk mendistribusikan pendanaan belanja modal serta pemanfaatan anggaran belanja modal maka peran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengalokasikan ke hal-hal yang lebih produktif.⁹

⁹Iin Indarti dan Sugiartiana, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009", *fakultas Ekonomi*, Vol.7 No. 2, 2012. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.05

Tabel 1.3
Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019
(dalam %)

Belanja Modal	
Tahun	Jumlah
2012	99,54
2013	47,58
2014	85,43
2015	61,3
2016	57
2017	91,28
2018	94,36
2019	30,76

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur

Dari tabel 1.3 bisa diketahui bahwa Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2012 sebesar 99,54 lalu pada tahun 2013 sebesar 47,58, di tahun 2014 sebesar 85,43, di tahun 2015 sebesar 61,3, dan 2016 mengalami penurunan sebesar 57,00, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 91,28, berikutnya di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 94,36 dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 30,76 maka dapat dibandingkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan dalam Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Dalam penurunan Belanja Modal di setiap periode tahunnya pemerintah daerah perlu memaksimalkan penggunaan belanja modal agar dapat terealisasi dengan baik dan untuk pembangunan

infrastruktur yang lebih baik kedepannya guna memajukan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*).¹⁰ Sektor industri dianggap sebagai *the leading sector* yang dimana mampu mendorong perkembangannya sektor-sektor yang lain, seperti sektor jasa pertanian. Struktur perekonomian disuatu wilayah yang relatif maju dapat ditandai dengan semakin besarnya peran sektor industri pengolahan dan jasa dalam menopang perekonomian wilayah tersebut. Sektor ini telah menggantikan peran sektor tradisional (pertanian) dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan wilayah.¹¹

¹⁰ Diakses dari, <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, pada tanggal 7 Maret 2021. Pukul 14.30

¹¹ Dyah Hapsari Amalina dan alla Asmara, "Keterkaitan Antar Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Di Indonesia, *Jurnal Angribisnis dan Ekonomi Pertanian*, Vol. 3 No. 2 2009. Diakses pada tanggal 2 maret 2021, pukul 22.23

Tabel 1.4
Alokasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Oleh Bank Umum Syariah Tahun
2012-2019
(dalam %)

Alokasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Oleh Bank Umum Syariah	
Tahun	Tw IV
2012	6,17
2013	5,25
2014	9,2
2015	2,96
2016	3,05
2017	3,92
2018	4,45
2019	4,1

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur

Dari tabel 1.4 bisa diketahui bahwa Alokasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Oleh Bank Umum Syariah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2012 sebesar 6,17 lalu pada tahun 2013 sebesar 5,25, di tahun 2014 sebesar 9,20, di tahun 2015 sebesar 2,96, dan 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,05, pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 3,92, berikutnya di tahun 2018 sebesar 4,45 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 4,1, tapi nilainya masih besar pada tahun 2015, maka dapat dibandingkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dan disisi lain tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mendukung hal tersebut perbankan syariah salah satunya yaitu BUS dan PDRB memberikan pembiayaan terhadap

sektor ekonomi atau lapangan usaha yang diberikan pembiayaan oleh perbankan syariah salah satunya sektor industri pengolahan.

Terdapat presentase data alokasi pembiayaan sektor ekonomi pada Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari data pada Bank Umum Syariah pada 2019 persentasenya sebesar 21,39% sedangkan pada Bank Konvensional sebesar 5,28. Pernyataan tersebut dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Presentase Alokasi Pembiayaan Sektor Ekonomi
Oleh Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional

KINERJA PERBANKAN JAWA TIMUR (BANK UMUM – BPR – SYARIAH)									
Keterangan (Juta Rp)	Bank Umum			BPR			Syariah		
	Okt 2018	Okt 2019	(%)	Okt 2018	Okt 2019	(%)	Okt 2018	Okt 2019	(%)
Total Aset Perbankan	681.795	717.759	5,28	13.739	15.117	10,03	34.680	42.098	21,39
DPK	537.707	578.452	7,58	9.049	10.025	10,78	27.222	33.841	24,32
LDR (%)	86,22	83,26	-2,96	106,97	105,70	-1,19	95,84	84,10	-11,74
NPL (%)	3,33	3,41	0,08	8,04	6,52	-1,52	4,15	3,14	-1,01
Kredit	463.600	481.634	3,89	9.680	10.596	9,47	26.089	28.460	9,09
Modal Kerja	261.797	266.268	1,71	6.306	6.871	8,97	10.443	11.114	6,42
Investasi	71.807	76.956	7,17	521	641.608	23,00	4.813	4.672	-2,93
Konsumsi	129.995	138.409	6,47	2.852	3.083	8,10	10.831	12.673	17,00
Kredit UMKM	138.652	152.867	10,25				6.934	7.468	7,69
NPL UMKM (%)	3,87	3,85	-0,02				6,49	6,69	0,21

Sumber: Biro Ekonomi Pemprov Jatim

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) dari mata uang suatu daerah atau negara. Inflasi merupakan satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang

dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi juga merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga berkaitan erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, dan parameter ekonomi makro lainnya. Oleh karena itu pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan perbankan sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.¹²

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian, inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Inflasi yang terjadi pada perekonomian di daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya yaitu inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi yang terjadi.¹³

¹²Satriadi, Kerangka Ekonomi Kabupaten Bintan, (Sumatra Barat: CV Insan Cendikia Mandiri, 2020), hal. 5-6

¹³ I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, "Pengaruh Inflasi, PDRB Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ep Unud*. Vol. 4 No. 8 2015. Diakses pada tanggal 8 Mei 2021, pukul 12.35

Tabel 1.6
Perkembangan Inflasi di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019
(dalam %)

Perkembangan Inflasi	
Tahun	Jumlah
2012	4,5
2013	7,59
2014	7,77
2015	3,08
2016	2,74
2017	4,04
2018	2,86
2019	2,2

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur

Dari tabel 1.5 bisa ketahui bahwa di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2019 mengalami flutuasi setiap tahunnya. Inflasi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 4,5 lalu pada tahun 2013 sebesar 7,59 di tahun 2014 sebesar 7,77, di tahun 2015 sebesar 3,08 , dan 2016 mengalami penurunan sebesar 2,74, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,04, berikutnya di tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 2,86 dan 2019 mengalami penurunan cukup signifikan mencapai 2,2, maka dapat dibandingkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup drastis. Dapat disimpulkan bahwa inflasi di Jawa Timur tahun 2014 secara tahunan mencapai 7,77 lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 2,12 yang dimana mengalami penurunan.

Bersadarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas bahwa analisis pengaruh PAD, belanja modal, inflasi dan alokasi pebiayaan

sektor ekonomi oleh bank umum syariah terhadap produk domestik regional bruto perlu dikaji lebih mendalam. Banyak penelitian yang sudah membahas mengenai penelitian ini, tetapi khusus pada penelitian ini lebih fokus membahas tentang daerah di provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk memahami seberapa besar pengaruh pengaruhnya maka diambil dengan judul “analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, inflasi dan alokasi pebiayaan sektor ekonomi oleh bank umum syariah terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019?
4. Bagaimana pengaruh Alokasi Pebiayaan Sektor Ekonomi oleh Bank Umum Syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019?
5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Inflasi dan Alokasi Pebiayaan Sektor Ekonomi oleh Bank Umum

Syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019.
2. Untuk menguji pengaruh pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019.
3. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019.
4. Untuk menguji pengaruh Alokasi Pebiayaan Sektor Ekonomi oleh Bank Umum Syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019.
5. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Inflasi dan alokasi pebiayaan sektor ekonomi oleh bank umum syariah Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas diharapkan menambah atau memberikan acuan bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan atau terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi terhadap berapa besarnya kontribusi PAD, Belanja modal, Inflasi dan Alokasi Pebiayaan Sektor Ekonomi oleh Bank Umum Syariah serta dapat menjadikan pertimbangan perumusan mengenai Produk Domestik Regional Bruto.

b. Bagi Akademik

Menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi tambahan yang berkaitan dengan tema penelitian yang relaven.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup ini mencakup rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini pasti mempunyai batasan untuk

mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dan mendapatkan hasil yang akurat. Batasannya sebagai berikut penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Inflasi dan Alokasi Pebiayaan Sektor Ekonomi oleh Bank Umum Syariah terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur.

Batasan ruang lingkup penelitian tersebut merupakan salah satu cara menghindari persoalan atau kendala yang muncul, keterbatasan ini meliputi terbatasnya waktu serta, tenaga serta meminimalisir masalah yang terlalu meluas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian hanya berfokus pada Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Inflasi dan Alokasi Pebiayaan Sektor Ekonomi oleh Bank Umum Syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2019.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan tentang masing-masing variable yang hendak diteliti yang berdasarkan teori-teori yang sudah dipaparkan yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang bertujuan memberikan kebebasan terhadap suatu daerah tertentu untuk

menganalisis lebih lanjut mengenai pendanaan asas desentralisasi pelaksanaan otonomi di suatu daerah.¹⁴

b. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu belanja yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun untuk menambah aset atau kekayaan daerah yang akan menimbulkan belanja lainnya. Belanja modal juga dimaksudkan untuk mendapat aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harga tetap lainnya. Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran anggaran aset tetap berwujud yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi.¹⁵

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu kenaikan harga secara terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Inflasi secara umum didefinisikan naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia (penawaran) sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang.¹⁶

¹⁴ Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hal. 104

¹⁵ Prima Rosita Arini dan Mangar wulan Kusuma, “Pengaruh Belanja Modal dan Penfapatn Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intevening”, *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi*, Vol. 5 No. 01, 2019. Diakses pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 10.14

¹⁶ Karlia Batik, “Analisis Pengaruh Investas, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pebangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11 No. 01 2013. Diakses pada tanggal 02 September 2020, pukul 14.00

d. Alokasi Pembiayaan Sektor Ekonomi

Alokasi pembiayaan atau dapat disebut dana alokasi merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerintahan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandaik kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ekonomi adalah aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa juga dikatakan sebagai ilmu menerangkan cara-cara menghasilkan.¹⁷

e. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu salah satu ukuran kuantitas yang diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan pembangunan ekonomi suatu daerah pada masa lampau, masa kini, dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang. Angka-angka PDRB merupakan salah satu indikatorekonomi makro yang banyak digunakan sebagai perencanaan pembangunan regional.¹⁸

¹⁷ Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Profinsi Jawa Tengah”, *jurnal Akutansi*, Vol. 18 No. 01 2014. Diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pukul 18.00

¹⁸ Mega Ajeng Kartikasari dan Abdul Rohman, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017)”, *Diponegara Jurnal Of Accounting*, Vol. 8 No. 2, 2019. Diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 13.47

2. Definisi Operasional

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah. Laba dari badan usaha milik daerah (BUMN) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
- b. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- d. Alokasi Pembiayaan Sektor Ekonomi adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN.
- e. PDRB adalah jumlah nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dilaporkan dan disajikan secara terperinci dalam enam bab yang setiap babnya terdapat masing-masing sub bab. Sebagai perincian dari enam bab sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian penulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan Batasan penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

Bab II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian yang meliputi: (a) kerangka teori variabel/sub pertama, (b) kerangka teori variabel/sub kedua, (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka berfikir penelitian, dan (e) hipotesis penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) data dan jenis data dan skala pengukuran, (d) Teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai (a) deskripsi data dan (b) pengujian hipotesis.

Bab V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai menjawab masalah penelitian, menafsir temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

Bab VI PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang (a) kesimpulan dan (b) saran-saran yang bermanfaat dari Lembaga/perusahaan.

Pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran, serta daftar riwayat hidup.